

LAPORAN KINERJA
KPP MADYA PEKANBARU
TAHUN 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU
Jalan Mr. SM Amin (Ringroad Arengka II) Pekanbaru, Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang 1
	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
	C. Sistematika Laporan 6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Perencanaan Strategis 8
	B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 9
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi 12
	B. Realisasi Anggaran 160
	C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 170
	D. Kinerja Lain-Lain 170
BAB IV	PENUTUP 171
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPP Madya Pekanbaru sebagai perwujudan atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara keseluruhan. Penyusunan LAKIN ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi dan misi DJP sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan program operasional. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi tersebut, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja utama sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja DJP. Sebagai sebuah instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, wilayah kerja kantor DJP meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diperlukan proses *cascading* untuk menurunkan tujuan, sasaran, strategi, dan program operasional tersebut berikut indikator-indikator kinerjanya ke setiap unit kerja instansi DJP yang ada di daerah.

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab, serta menjadi bahan analisis dan evaluasi untuk peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Pekanbaru



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Winardi



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Pekanbaru Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pencapaian sepuluh sasaran strategis dan sembilan belas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan pada KPP Madya Pekanbaru selama tahun 2024. Dari Laporan Kinerja ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seluruh kegiatan tersebut diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja yang dianalisis secara kuantitatif sehingga hasilnya bersifat objektif dan akurat.

Saat ini, hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada Dashboard Kinerja Organisasi di mana data yang ditampilkan sudah divalidasi oleh pemilik proses bisnis sehingga dapat berfungsi sebagai *single source of truth* untuk penghitungan Nilai Kinerja Organisasi. Berdasarkan data pada Dashboard Kinerja Organisasi tersebut, indkes capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2024 adalah 107,80. Angka ini berada di zona hijau yang berarti telah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Selaian capaian Nilai Kinerja Organisasi yang tinggi, di tahun 2024 ini KPP Madya Pekanbaru juga berhasil meraih predikat sebagai Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau.

Pencapaian yang diraih KPP Madya Pekanbaru selama tahun 2024 bukan hanya kerja keras satu atau dua orang saja tetapi merupakan wujud dedikasi dan komitmen seluruh pegawai KPP Madya Pekanbaru untuk memberikan kinerja terbaiknya. Ke depannya, KPP Madya Pekanbaru akan terus berupaya untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang lebih baik lagi seiring dengan berlangsungnya implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah serangkaian aktivitas, alat, dan prosedur yang disusun secara sistematis untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menyoroti, serta melaporkan kinerja pada instansi pemerintah, dengan tujuan untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi tersebut. Kinerja sendiri berarti keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan review dan evaluasi Kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk menghimpun penerimaan pajak negara, KPP Madya Pekanbaru tentunya dihadapi dengan berbagai tantangan. Salah satu yang paling mendasar adalah mengenai upaya untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan seperti penurunan setoran PPh Pasal 25, meningkatnya restitusi, dan keterbasan jumlah Wajib Pajak. Namun demikian, KPP Madya Pekanbaru berhasil melaluinya yang dibuktikan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di atas 100. Oleh karena itu, laporan kinerja organisasi sangat diperlukan untuk mengukur kinerja tahun lalu dan memproyeksikan kinerja tahun berikutnya agar lebih baik dan maksimal lagi.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi KPP Madya Pekanbaru telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian diberlakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-28/Pj/2021 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan tersebut merupakan wujud dari penyempurnaan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor perpajakan, serta meningkatkan kinerja organisasi.

Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP Madya Pekanbaru sebagai organisasi instansi vertikal mengalami perubahan tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. Tugas yang dimiliki KPP Madya Pekanbaru yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPP Madya Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

- i. penjaminan kuitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrator kantor.

Adapun struktur organisasi KPP Madya Pekanbaru tergambar pada Lampiran I terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- e. Seksi Pengawasan I
- f. Seksi Pengawasan II
- g. Seksi Pengawasan III
- h. Seksi Pengawasan IV
- i. Seksi Pengawasan V
- j. Seksi Pengawasan VI
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut tugas yang dimiliki masing-masing seksi tersebut.

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak

lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Dalam menjalankan tugas yang diamanatkan tersebut, KPP Madya Pekanbaru didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah komposisi SDM yang ada di KPP Madya Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan formal, jabatan, dan jenis kelamin per 31 Desember 2024 dengan jumlah keseluruhan 110 orang pegawai.

No.	Tingkat Pendidikan Formal	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTA	1	0	1
2.	Diploma I	2	10	12
3.	Diploma III	9	12	21
4.	Sarjana (S1)/DIV	31	11	42
5.	Pasca Sarjana (S2)	27	7	34
Jumlah		70	40	110

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Kantor	1	0	1
2.	Kepala Subbag	1	0	1
3.	Kepala Seksi	7	2	9
4.	<i>Supervisor</i>	5	1	6
5.	Fungsional Pemeriksa Pajak	15	6	21
6.	Fungsional Penyuluh Pajak	4	2	6
7.	Fungsional Penilai Pajak	1	0	1
8.	<i>Account Representative</i>	30	4	34
9.	Pelaksana	7	24	31
Jumlah		71	39	110

Adapun struktur pejabat yang terdapat dalam KPP Madya Pekanbaru adalah sebagai berikut.

- Kepala KPP Madya merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada KPP Madya merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2024 terdiri dari empat bab. Bab I berisikan pendahuluan dan tiga subbab, yaitu latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sistematika laporan. Bagian pendahuluan memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Latar belakang menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja dan permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Subbab tugas, fungsi, dan struktur organisasi menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini serta struktur para pejabat dan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi.

Selanjutnya, bab II berisikan perencanaan kinerja yang terdiri dari dua subbab, yaitu perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024. Subbab perencanaan strategis menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dengan memperhatikan informasi tematik APBN. Subbab penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 sendiri berisikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

Bab III menyajikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja yang dijabarkan dalam lima subbab sebagai berikut.

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - target pada Renja DJP Tahun 2024 (hanya pada IKU yang terdapat dalam Renja)
 - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir
 - target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP

3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
 7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 8. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)
 9. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan lain-lain.
 10. Rencana aksi ke depan.
- b. Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.
 - c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 meliputi efisiensi bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
 - d. Kinerja Lain-lain
Menguraikan pencapaian organisasi antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking.

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisi uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, untuk mendukung laporan kinerja organisasi, disertakan juga lampiran-lampiran berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 yang disusun sebagai acuan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi Pendahuluan; Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan Penutup.

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan: “menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab untuk mencapai target penerimaan negara dan membangun kemitraan yang setara dengan semua *stakeholder*. DJP dipercaya untuk mengelola administrasi perpajakan secara efektif dan efisien, penuh integritas, berlandaskan ketentuan undang-undang, adil, dan didukung oleh layanan berbasis teknologi. Selain itu, DJP juga memastikan transparansi dalam bidang eksternal seperti hak dan kewajiban wajib pajak, serta internal DJP sendiri seperti pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi mutasi, karir, kompensasi, dan kinerja.

Selanjutnya misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang aaktif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak ini mendukung Misi Kementerian Keuangan, yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga menyelaraskan tujuannya dengan tujuan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sendiri menetapkan 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang
5. akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
6. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Pekanbaru tentunya juga memiliki visi dan misi organisasi yang selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Visi KPP Madya Pekanbaru yang tertuang dalam KEP-43/KPP.0210/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan Visi, Misi, Janji Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru Tahun 2024 adalah menjadi institusi penghimpun pajak negara yang membanggakan, amanah dan terpercaya di Provinsi Riau. Sementara misi KPP Madya Pekanbaru yaitu menyelenggarakan fungsi pelayanan dan pengawasan perpajakan bagi Wajib Pajak besar di Provinsi Riau secara modern, akuntabel, efektif dan efisien.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tentang Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 dan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-244/WPJ.02/2024 tentang Permintaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Three sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024, KPP diminta untuk melakukan penyusunan dan penanganan Kontrak Kinerja Tahun 2024. Adapun Kontrak Kinerja Kepala KPP Madya Pekanbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Dalam proses penyusunannya, Perjanjian Kinerja telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan kementerian keuangan, sebagaimana telah disampaikan pada subbab perencanaan strategis, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan Negara yang Optimal
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang telah diraih mencerminkan dedikasi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat. Setiap pencapaian ini bukan hanya sekadar angka atau hasil yang tampak, tetapi juga menunjukkan kualitas proses dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Di tahun 2024 ini, KPP Madya Pekanbaru telah berhasil mengoptimalkan berbagai aspek operasional, meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder*, serta menerapkan inovasi untuk mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan fokus yang konsisten pada keberlanjutan dan perbaikan, capaian ini menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis ke depan untuk terus mendorong kinerja yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan.

Capaian kinerja KPP Madya Pekanbaru dapat dilihat dari Nilai Kinerja Organisasi yang diukur dari empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learning & growth perspective*. Keempat perspektif ini kemudian dijabarkan dalam 10 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut adalah capaian Sasaran Strategis dan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Madya Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 sesuai Dashboard Kinerja Organisasi.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	95,11
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							95,11
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,11%	Max	E/L	26%	57,78%	100,11
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	88,28	Max	P/L	19%	42,22%	88,28
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,24
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,92
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,69%	Max	P/L	19%	42,22%	118,69
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,55
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,55%	Max	E/M	21%	100,00%	100,55
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,50
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,93
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,86%	Max	E/M	21%	50,00%	109,86
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	119,71%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,87
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,67%	Max	P/M	14%	33,33%	119,67
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,94%	Max	P/M	14%	33,33%	119,94
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>		0,00%						25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,43
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	116,84	Max	P/M	14%	33,33%	116,84
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,99	Max	P/M	14%	33,33%	109,39
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,80

Berikut adalah analisis capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran strategis ini merupakan optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

a. IKU 1a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	51,00%	51,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,55%	36,86%	36,86%	58,37%	58,37%	100,11%	100,11%
Capaian	75,23%	72,27%	72,27%	77,83%	77,83%	100,11%	100,11%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Target penerimaan pajak KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 pertama kali ditetapkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-297/WPJ.02/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Penyampaian Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024. Dalam Nota Dinas tersebut dikatakan bahwa target penerimaan pajak dari kegiatan PPM dan

kegiatan PKM KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 berdasarkan UU No. 19 Tahun 2023 (UU APBN 2024) adalah Rp9.537.485.262.670,00, sedangkan berdasarkan target internal DJP tahun 2024 sebesar Rp9.760.626.563.620,00.

Target penerimaan pajak ini mengalami beberapa kali perubahan di mana perubahan terakhir ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-1946/WPJ.02/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kegiatan per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024. Dalam Nota Dinas tersebut, target penerimaan pajak KPP Madya Pekanbaru dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM adalah sebesar Rp7.695.076.636.000,00. Di akhir tahun 2024, KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target yang telah ditetapkan tersebut dengan total penerimaan pajak neto sebesar Rp7.703.662.785.822,00 atau 100,11%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	89.89%	102.59%	118.75%	101.56%	100,11%

Sumber: Apportal dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebanyak empat tahun berturut-turut di mana capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 118,75%. Keberhasilan KPP Madya Pekanbaru dalam mencapai setiap target penerimaan pajak yang diamanatkan ini tentunya tak terlepas dari upaya bersama yang telah dilaksanakan oleh seluruh pihak internal maupun eksternal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,11%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,11%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, penerimaan pajak KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari sektor pajak-pajak utama, seperti terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta pemulihan kegiatan ekonomi. Selain itu, penyesuaian tarif PPN melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menaikkan tarif dari 10% menjadi 11% juga mempengaruhi dalam tercapainya IKU ini.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan DPP Mandatori Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, sektor usaha prioritas nasional/kanwil dan KPP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK
- 2) Membuat LHPt dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan.
- 3) Membuat LHPt dan atau SP2DK tahun berjalan (PPM) untuk wajib pajak yang terlambat lapor/setor, tidak lapor/setor dan atau berdasarkan data pemicu tahun berjalan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa sesuai jatuh tempo masing-masing jenis pajak untuk seluruh wajib pajak
- 5) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 6) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan (SP2DK outstanding)
- 7) Melakukan visit terhadap WP yang belum menyelesaikan SP2DK (outstanding)
- 8) Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pencairan
- 9) Melakukan tindakan penagihan berupa penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan yang telah jatuh tempo, menyampaikan Surat Paksa
- 10) Melakukan penyitaan terhadap aset wajib pajak, serta melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak.

○ **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 2) Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19
- 3) Penyesuaian tarif PPN
- 4) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- 5) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif
- 6) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Penurunan setoran PPh Pasal 25
- 2) Meningkatnya restitusi karena meningkatnya transaksi Wajib Pajak untuk ekspor dan ke kawasan berikat
- 3) Banyaknya putusan banding yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak.
- 4) Presentase SKP yang disetujui Wajib Pajak masih rendah dan mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan tahun lalu, sehingga mengakibatkan kurangnya pembayaran atas SKP yang diterbitkan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu:
 - 1) Kolaborasi dengan penilai untuk memaksimalkan potensi pajak pada saat penyusunan LHPT
 - 2) Kolaborasi dengan fungsional saat dilakukan konseling kepada Wajib Pajak atas pembahasan SP2DK untuk meningkatkan pencairan potensi pajak
 - 3) Kolaborasi dengan Penyidik Kanwil untuk meningkatkan pencairan potensi pajak
 - **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**
 Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - 1) Kendala dari kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian dihadapi dengan mengoptimalkan perencanaan penerimaan, secara rutin menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan, serta menindaklanjuti laporan yang diterima.

- 2) Kendala terkait perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama penyumbang pajak diatasi dengan pengawasan yang terfokus sesuai kebijakan nasional serta memperkuat sinergi melalui *joint program, joint analysis, joint business process*.
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**
 Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.
 - **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:
 - 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
 - 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Semester I Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, sektor usaha prioritas nasional/kanwil dan KPP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK.
- 2) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan.
- 3) Membuat LHPT dan atau SP2DK tahun berjalan (PPM) untuk wajib pajak yang terlambat lapor/setor, tidak lapor/setor dan atau berdasarkan data pemicu tahun berjalan.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa sesuai jatuh tempo masing-masing jenis pajak untuk seluruh wajib pajak.
- 5) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan.
- 6) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan (SP2DK outstanding).
- 7) Melakukan visit terhadap WP yang belum menyelesaikan SP2DK (outstanding).
- 8) Memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada 100 Wajib Pajak dengan jumlah piutang pajak terbesar dan dengan kriteria kualitas piutang pajak yang lancar sesuai DSPC.

- 9) Memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada piutang Wajib Pajak yang akan daluwarsa penagihan.
- 10) Melakukan *asset tracing* terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak
- 11) Mengoptimalkan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh WP dan meningkatkan komunikasi yang baik dengan WP sehingga WP mau melakukan pembayaran.
- 12) Melakukan percepatan penyelesaian SP2 yang memiliki potensi besar dan Wajib Pajak memiliki kemampuan bayar tinggi.
- 13) Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dengan menerapkan kebijakan penguatan uji bukti dan kebijakan fokus audit dalam rangka meningkatkan tingkat persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan.

b. IKU 1b-CP: Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- 2) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
	n	

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	94,21	85,20	85,20	86,88	86,88	88,28	88,28
Capaian	94,21	85,20	85,20	86,88	86,88	88,28	88,28

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

KPP Madya Pekanbaru mengampu indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 100. Dalam perhitungannya indeks ini didapatkan dari 50% indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto ditambah dengan 50% indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Berdasarkan data dari Dashboard Kinerja Organisasi, KPP Madya Pekanbaru hanya dapat mencapai angka 88,28 dari target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	0,00	113,47	99,49	110,77	88,28

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 22,49 dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sebelum tahun 2023 karena di tahun-tahun tersebut, fokus IKU hanya pada pertumbuhan penerimaan pajak bruto saja.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan	100	-	100	88,28

Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas				
--	--	--	--	--

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100	100	88,28

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Madya Pekanbaru hanya berhasil mencapai angka 88,28 dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan komponen untuk menghitung yang cukup kompleks seperti makroekonomi yang sulit diprediksi.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas, antara lain:

- 1) Mitigasi resiko dengan melakukan adjustmen pada bulan-bulan akhir tiap triwulan agar deviasi Triwulan tetap pada koridor yang diharapkan

- 2) Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti koordinasi dengan seksi pengawasan dan P3 agar keakuratan perhitungan proyeksi penerimaan dapat maksimal
- 3) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan DPP Mandatori Semester II Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, sektor usaha prioritas nasional/kanwil dan KPP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK
- 4) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan.
- 5) Membuat LHPT dan atau SP2DK tahun berjalan (PPM) untuk wajib pajak yang terlambat lapor/setor, tidak lapor/setor dan atau berdasarkan data pemicu tahun berjalan.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa sesuai jatuh tempo masing-masing jenis pajak untuk seluruh wajib pajak
- 7) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 8) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan (SP2DK outstanding)
- 9) Melakukan visit terhadap WP yang belum menyelesaikan SP2DK (outstanding)

Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Madya Pekanbaru di tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya beberapa kendala, antara lain:

- 1) Data sumber yang belum cukup reliabel untuk melakukan perhitungan proyeksi perencanaan kas
- 2) Kondisi makro ekonomi daerah yang fluktuatif sehingga sulit untuk memprediksi penerimaan yang akurat
- 3) Penurunan setoran PPh Pasal 25

- 4) Meningkatnya restitusi karena meningkatnya transaksi Wajib Pajak untuk ekspor dan ke kawasan berikat
- 5) Banyaknya putusan banding yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

○ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti memitigasi risiko terhambatnya pencapaian IKU dan mengumpulkan banyak sumber data terkait.

○ **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai karena adanya mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Madya Pekanbaru yaitu berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait sehingga kejadian-kejadian anomali dapat diprediksi dengan lebih akurat.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Madya Pekanbaru dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Kendala dari kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian dihadapi dengan mengumpulkan data dari banyak sumber yang relevan dan reliabel.
- 2) Kendala terkait perencanaan kas diatasi dengan berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:
 - 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
 - 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
 - 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
 - 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.
 - **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**
 Dalam memaksimalkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.
 - 1) Mengumpulkan data dari banyak sumber dan memastikan kekuatan dan kualitas data yang relevan dan reliabel
 - 2) Berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait untuk memitigasi risiko sehingga kejadian-kejadian anomali dapat di prediksi
 - 3) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) semester I Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, sektor usaha prioritas nasional/kanwil dan KPP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP,

CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK

- 4) Membuat LHPt dan atau SP2DK berdasarkan DPP Mandatory yang telah ditetapkan.
- 5) Membuat LHPt dan atau SP2DK tahun berjalan (PPM) untuk wajib pajak yang terlambat lapor/setor, tidak lapor/setor dan atau berdasarkan data pemicu tahun berjalan.
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa sesuai jatuh tempo masing-masing jenis pajak untuk seluruh wajib pajak
- 7) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 8) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK atas SP2DK yang telah diterbitkan (SP2DK outstanding)
- 9) Melakukan visit terhadap WP yang belum menyelesaikan SP2DK (outstanding)

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

a. IKU 2a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22,00%	51,00%	51,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,79%	37,96%	37,96%	60,43%	60,43%	100,05%	100,05%
Capaian	71,11%	74,43%	74,43%	80,57%	80,57%	100,05%	100,05%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Madya Pekanbaru berdasarkan nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-1946/WPJ.02/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kegiatan per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.689.707.506.000,00. Hingga akhir tahun 2024, KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai 100,05% dari target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp6.692.755.934.070,00.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	120,41%	107,73%	100,05%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang ditetapkan sebanyak empat tahun berturut-turut di mana capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 120,41%. Keberhasilan KPP Madya Pekanbaru dalam mencapai setiap target penerimaan pajak yang diamanatkan ini tentunya tak terlepas dari upaya bersama yang telah dilaksanakan oleh seluruh pihak internal maupun eksternal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,05%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,05%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, penerimaan pajak KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa sesuai jatuh tempo masing-masing jenis pajak untuk seluruh wajib pajak
 - 2) Membuat LHPt dan atau SP2DK tahun berjalan (PPM) untuk wajib pajak yang terlambat lapor/setor, tidak lapor/setor dan atau berdasarkan data pemicu tahun berjalan
 - 3) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
 - 4) Menyelesaikan permintaan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK)
 - 5) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban Masa

6) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban Masa

○ **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan.

Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul, seperti adanya Wajib Pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak, seperti melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa serta visit ke lokasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh masing-masing seksi pengawasan.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu masih adanya Wajib Pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini telah diatasi dengan melakukan pemanggilan dan konseling oleh seksi pengawasan terkait.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.
- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**
 Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:
 - 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
 - 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
 - 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
 - 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.
 - **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**
 Dalam memaksimalkan penerimaan negara dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa sesuai jatuh tempo masing-masing jenis pajak untuk seluruh

wajib pajakMembuat LHPT dan atau SP2DK tahun berjalan (PPM) untuk wajib pajak yang terlambat lapor/setor, tidak lapor/setor dan atau berdasarkan data pemicu tahun berjalan

- 2) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 3) Menyelesaikan permintaan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK)
- 4) Melakukan pemanggilan dan konseling
- 5) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban Masa

b. IKU 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- 1) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 2) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 3) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan

- sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 4) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 - 5) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 - 6) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - 7) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	26,91%	114,99%	114,99%	117,70%	117,70%	118,69%	118,69%
Capaian	44,85%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	118,69%	118,69%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Target jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi KPP Madya Pekanbaru ditetapkan sebesar 810. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-482/WPJ.02/2024 tanggal 31 April 2024 hal Penyesuaian Target IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi Strategis di Triwulan I Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Riau. Hingga akhir tahun 2024, jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi sebanyak 811 SPT atau 118,69% dari target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99,73%	99,64%	100,00%	100,24%	118,69%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi jumlah Wajib Pajak KPP Madya Pekanbaru yang wajib SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di mana

capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 118,69%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	118,69%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	100,05%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh komitmen dan kerja keras seluruh pegawai serta meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya-upaya tersebut, antara lain:

- 1) Mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Strategis dan Badan terdaftar yang berisi himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan
- 2) Mengirimkan Nota Dinas Daftar Penerimaan SPT Tahunan yang dilaporkan via e-filing dan e-form ke Seksi Pengawasan agar dapat diteliti kelengkapannya oleh AR
- 3) Mengadakan kelas pajak baik luring maupun daring terkait pengisian SPT Tahunan beserta kelengkapannya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- 4) Melaksanakan edukasi dan asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi oleh Relawan Pajak
- 5) Melakukan bimbingan teknis dan sharing session
- 6) Pelaporan SPT Tahunan PPh OP dan Badan Relawan Pajak sebagai bekal tugas dalam asistensi pelaporan SPT Tahunan
- 7) Melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan di Lobi Bank Riau Kepri Syariah
- 8) Melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan di Area Car Free Day
- 9) Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan di Layanan Diluar Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP)
- 10) Melakukan asistensi pengisian SPT Tahunan di Mal Pekanbaru
- 11) Melakukan Kelas Pajak Offline di Kantor Wilayah DJP Riau
- 12) Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan di Festival Gema Isra Mikraj Pekanbaru
- 13) Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan di PT. KLIK DUMAI, PT. MULTI PALMA SEJAHTERA, PT. VADHANA INTERNATIONAL, dan PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA

- 14) Membuat konten untuk mengajak Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu pada instagram (post, ig live) dan youtube (podcast).

- **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi secara umum didorong oleh upaya seluruh pegawai untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Upaya ini diwujudkan dengan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

Meskipun target realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala dalam mencapainya, seperti:

1. Tidak semua wajib pajak yang diundang hadir dalam Sosialisasi/Penyuluhan yang diadakan.
2. Pengiriman undangan sosialisasi via WA Blast tidak semuanya terkirim sehingga tujuan penerimaan informasi tidak efektif.
3. Sebagian Wajib Pajak masih tidak patuh dalam pelaporan SPT Tahunan PPh dan/atau sudah tidak aktif beroperasi

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 Capaian atas kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti pemberian himbauan, asistensi, dan pengawasan pelaporan SPT Tahunan.
 - **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**
 Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi tersebut, seperti melakukan kolaborasi antara Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dengan mengirimkan Nota Dinas Daftar Penerimaan SPT Tahunan yang dilaporkan via e-filing dan e-form ke Seksi Pengawasan agar dapat diteliti kelengkapannya oleh *Account Representative* yang bersangkutan.
 - **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**
 Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu sebagian Wajib Pajak sudah tidak aktif beroperasi. Hal ini telah diatasi

dengan melakukan analisis terhadap profil pelaporan SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi), beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak Badan terdaftar yang berisi himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan
- 2) Mengadakan sosialisasi/penyuluhan terkait pengisian SPT Tahunan beserta kelengkapannya untuk Wajib Pajak Badan
- 3) Memberikan respon terhadap konsultasi yang dilakukan melalui WhatsApp maupun langsung secara cepat dan tanggap khususnya terkait pelaporan SPT Tahunan
- 4) Melakukan analisis terhadap profil pelaporan SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya
- 5) Menerbitkan surat himbauan pelaporan SPT Tahunan PPh kepada wajib pajak untuk lapor tepat waktu
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

a. IKU 3a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor

Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	25,17%	29,37%	29,37%	44,40%	44,40%	100,55%	100,55%
Capaian	100,68%	58,74	58,74	59,20	59,20	100,55%	100,55%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Madya Pekanbaru berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-1946/WPJ.02/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Penyampaian Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per Kegiatan per KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.005.369.130.000,00. Hingga akhir tahun 2024, KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai 100,55% dari

target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp1.010.906.851.752,00.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)			103,97%	56,49%	100,55%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di tahun 2024 dengan selisih dari capaian tahun sebelumnya sebesar 44,06% lebih tinggi Keberhasilan KPP Madya Pekanbaru dalam mencapai setiap target penerimaan pajak yang diamanatkan ini tentunya tak terlepas dari upaya bersama yang telah dilaksanakan oleh seluruh pihak internal maupun eksternal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,55%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,55%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, penerimaan pajak KPP Madya Pekanbaru dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan DPP Mandatori Semester II Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan DSP4.

Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK

- 2) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan.
- 3) Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan tahun pajak sebelum tahun pajak
- 4) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan
- 5) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 6) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 7) Kolaborasi dengan supervisor saat konseling atas SP2DK outstanding yang sulit cair
- 8) Membuat Daftar Sasaran Prioritas Pencairan
- 9) Melakukan tindakan penagihan berupa penerbitan surat teguran kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan yang telah jatuh tempo, menyampaikan Surat Paksa, Melakukan penyitaan terhadap aset wajib pajak, serta melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak.

○ **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) secara umum didorong oleh realisasi PKM pemeriksaan dan penagihan yang berhasil mencapai angka 120%.

Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul, seperti:

- 2) Realisasi LHP2DK sebelum tahun berjalan (komprehensif) belum optimal karena perubahan kebijakan penetapan DPP yang semula setiap triwulan menjadi setiap semesteran.
- 3) Presentase SKP yang disetujui Wajib Pajak masih rendah dan mengalami pertumbuhan yang negatif dibandingkan tahun lalu, sehingga mengakibatkan kurangnya pembayaran atas SKP yang diterbitkan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Forum Pengawasan (*Account Representative* dan Kepala Seksi Pengawasan) dan *In House Training* (IHT)
- 2) Pengelolaan Penerbitan SP2DK dengan menerbitkan SP2DK di 3 bulan setelah penetapan DPP per semester berjalan dan penuntasan penyelesaian LHP2DK dimulai bulan ke-5 per semester berjalan

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu realisasi LHP2DK sebelum tahun berjalan (komprehensif) belum optimal karena perubahan kebijakan penetapan DPP yang semula setiap triwulan menjadi setiap semesteran. Hal ini telah diatasi dengan membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan. Kendala lainnya adalah rendahnya persentase SKP yang disetujui Wajib Pajak menurunnya pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sehingga mengakibatkan pembayaran atas SKP yang diterbitkan menjadi berkurang. Hal ini telah diatasi dengan memprioritaskan tindakan penagihan aktif atas piutang Wajib Pajak yang akan jatuh tempo penagihan dan melakukan percepatan penyelesaian SP2 yang memiliki potensi besar dan Wajib Pajak memiliki kemampuan bayar tinggi.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan penerimaan negara dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP Mandatory yang telah ditetapkan.
- 2) Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan tahun pajak sebelum tahun pajak 2024
- 3) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK
- 4) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 5) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 6) Kolaborasi dengan supervisor saat konseling atas SP2DK outstanding yang sulit cair
- 7) Melakukan visit terhadap WP yang belum menyelesaikan SP2DK (outstanding)
- 8) Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC
- 9) Memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada piutang Wajib Pajak yang akan daluwarsa penagihan
- 10) Melakukan percepatan penyelesaian SP2 yang memiliki potensi besar dan Wajib Pajak memiliki kemampuan bayar tinggi
- 11) Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dengan menerapkan kebijakan penguatan uji bukti dan kebijakan fokus audit dalam rangka meningkatkan tingkat persetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

a. IKU 4a-CP: Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- i. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- ii. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- iii. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- b. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- 2) Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	84,04%	87,21%	87,21%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Madya Pekanbaru ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat tanggal 1 Maret 2024 hal Penyampaian Penetapan Angka Mutlak IKU Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan. Hingga akhir tahun 2024, KPP Madya Pekanbaru berhasil merealisasikan sebesar 88,80% dari target sehingga capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah 120%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	80,40%	84,00%	88,80%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

KPP Madya Pekanbaru dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	-	74,00%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	74,00%	88,80%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai, khususnya penyuluhan.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan one on one perubahan perilaku dengan tujuan Wajib pajak yang kekurangan setor pembayaran untuk melakukan penyetoran pembayaran atau melakukan pembetulan SPT nya
- 2) Melakukan kegiatan edukasi percepatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Strategis kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan
- 3) Mengadakan Live Instagram dan Podcast Youtube terkait aturan perpajakan terbaru sebagai bagian dari sosialisasi/penyuluhan perpajakan

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan secara umum didorong oleh upaya-upaya Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

Meskipun target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti pengiriman undangan kegiatan via *WhatsApp Blast* tidak semuanya terkirim sehingga tujuan penerimaan informasi tidak efektif.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan

penyuluhan adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti kegiatan penyuluhan *one on one* perubahan perilaku, edukasi percepatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, pengiriman *WhatsApp Blast* berisikan informasi maupun pengingat kewajiban, dan asistensi penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti pemberian himbauan melalui media sosial, melaksanakan kegiatan penyuluhan *one on one* perubahan perilaku, serta melakukan edukasi percepatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu tidak terikirimnya semua undangan kegiatan via *WhatsApp Blast* sehingga tujuan penerimaan informasi tidak efektif. Hal ini telah diatasi dengan mengadakan *live Instagram dan Podcast Youtube* terkait aturan perpajakan terbaru sebagai bagian dari sosialisasi/penyuluhan perpajakan.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- d) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- e) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- f) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi persentase target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Mengirimkan WA Blast untuk memberikan informasi maupun pengingat kewajiban:
 - a) Himbauan untuk menyampaikan SPT Tahunan untuk WP OP;
 - b) Himbauan untuk menyampaikan SPT Tahunan untuk WP Badan;
 - c) Informasi terkait sosialisasi, penyuluhan, dan informasi/peraturan terbaru.
- 2) Melakukan kegiatan asistensi penyampaian SPT Tahunan WP OP melalui e-filing oleh relawan pajak di kantor dan layanan di luar kantor.
- 3) Mengadakan Live Instagram dan Podcast Youtube terkait penyampaian SPT Tahunan maupun aturan perpajakan yang baru diterbitkan.

b. IKU 4b-N: Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal

dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- i. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- ii. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- iii. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,23%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	109,86%	109,86%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,86	109,86

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Madya Pekanbaru di tahun 2024 adalah 109,86% dari target yang telah ditetapkan di mana hal ini membuat capaian IKU tersebut sebesar 109,86.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	88,46%	87,72%	109,86%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Madya Pekanbaru di tahun 2024 merupakan yang tertinggi sejak lima tahun terakhir yaitu sebesar 109,86%.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	-	100,00%	109,86%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100,00%	100,00%	109,86%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai, khususnya penyuluhan.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Madya Pekanbaru. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Memilih Wajib Pajak yang akan dilakukan survey efektivitas kepuasan atas penyuluhan dan pelayanan
2. Mengirimkan WA Blast kepada WP terpilih untuk melakukan pengisian survey kepuasan efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

- **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan secara umum didorong oleh upaya-upaya Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan yang prima kepada Wajib Pajak.

Meskipun target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti tidak semua Wajib Pajak terpilih mengisi survey kepuasan efektivitas penyuluhan dan pelayanan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti pemilihan Wajib Pajak yang akan mengikuti survei dan pemberitahuan pengisian survei.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak dan berkoordinasi dengan *Account Representative* terkait pelaksanaan survei.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu tidak masih terdapat Wajib Pajak terpilih yang tidak mengisi survey kepuasan efektivitas penyuluhan dan pelayanan. Hal ini telah diatasi dengan melakukan koordinasi antara Seksi Pelayanan dengan *Account Representative* untuk mengingatkan Wajib Pajak terkait pelaksanaan survei.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilih Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Berkoordinasi bersama AR terkait pelaksanaan survey kepada Wajib Pajak dan mengingatkan WP untuk mengisi survey dengan baik.
- 2) Selalu mengedukasi wajib pajak melalui media sosial seperti Youtube, Instagram, dan WA Blast terkait aturan terbaru karena akan membantu wajib pajak dalam meningkatkan pengetahuan perpajakannya.
- 3) Cepat tanggap dalam merespon chat WA dari Wajib Pajak yang akan melakukan konsultasi ataupun mendapatkan layanan dari KPP.

- 4) Meningkatkan Layanan kepada Wajib Pajak dengan lebih baik khususnya Petugas TPT dan Petugas Helpdesk.
- 5) Memilih dan membuat daftar Wajib Pajak yang memiliki sifat kooperatif terhadap pelayanan untuk meningkatkan kualitas hasil survey. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan cara briefing bersama AR Pengawasan.

5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

a. IKU 5a-CP: Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

- c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- b) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk

masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- d) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- e) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- f) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan

atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,

- g) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- **Formula IKU**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$		
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$		
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 40\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 60\%)$		
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$		
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$		

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 60\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 40\%)$		
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$		
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$		

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	119,71%	120,00%	120,00%	109,33%	109,33%	119,71%	119,71%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Ketentuan mengenai Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis diatur dalam Nota Dinas Direktur Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-280/PJ.06/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Tahun 2024. Di tahun 2024, KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai realisasi 119,71% dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian IKU ini adalah 120,00%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	-	-	103,79%	105,20%	119,71%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis KPP Madya Pekanbaru dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90,00%	-	90,00%	119,71%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90,00%	90,00%	119,71%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kerja keras seluruh pegawai untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 (tanggal 11 dan 21 setiap bulan), PPh Pasal 25 (tanggal 16 setiap bulan), PPN/PPnBM (setiap tanggal 1 setiap bulan), dan pajak-pajak lainnya untuk seluruh wajib pajak baik pusat maupun cabang
- 2) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 3) Membuat LHPt dan atau SP2DK tahun berjalan (masa) untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor/setor
- 4) Menindaklanjuti data pemicu dan penguji di Approweb dan Apportal dalam LHPt dan atau SP2DK untuk tahun berjalan (masa)
- 5) Menyelesaikan permintaan data dan atau keterangan (LHP2DK) atas pembayaran masa
- 6) Menyelesaikan permintaan data dan atau keterangan (LHP2DK) atas SP2DK tersebut

○ **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa Wajib Pajak.

Meskipun target persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti Keterbatasan jumlah wajib pajak yang dapat diterbitkan STP sesuai ketentuan IKU.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase target persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti kegiatan penyuluhan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa, penerbitan Surat Teguran dan STP, serta penyelesaian permintaan data dan atau keterangan atas pembayaran masa tersebut.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi target persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti Membuat LHPT dan atau SP2DK tahun berjalan (masa) untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor/setor.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu terbatasnya jumlah wajib

pajak yang dapat diterbitkan STP sesuai ketentuan IKU. Hal ini telah diatasi dengan membuat LHPT dan atau SP2DK tahun berjalan (masa) untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor/setor.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi pengawasan pembayaran masa WP strategis, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 (tanggal 11 dan 21 setiap bulan), PPh Pasal 25 (tanggal 16 setiap bulan), PPN/PPnBM (setiap tanggal 1 setiap bulan), dan pajak-pajak lainnya untuk seluruh wajib pajak baik pusat maupun cabang
- 2) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 3) Membuat LHPT dan atau SP2DK tahun berjalan (masa) untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor/setor
- 4) Menindaklanjuti data pemicu dan penguji di Approweb dan Apportal dalam LHPT dan atau SP2DK untuk tahun berjalan (masa)
- 5) Menyelesaikan permintaan data dan atau keterangan (LHP2DK) atas pembayaran masa
- 6) Menyelesaikan permintaan data dan atau keterangan (LHP2DK) atas SP2DK

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

a. IKU 6a-CP: Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a) Komponen Penelitian (40%)
- b) Komponen Tindak Lanjut (60%)

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis		=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	102,16%	120,00%	120,00%	90,00%	90,00%	120,00%	120,00%
Capaian	102,16%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis di tahun 2024 dengan realisasi 120% dari target sebesar 100%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis	-	-	150,18%	105,20%	120,00%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis dari tahun ke tahun capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022. Keberhasilan ini

menunjukkan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak berjalan dengan optimal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyelesaikan LHP2DK atas DPP outstanding yang belum selesai dan DPP Semester I tahun 2024
- 2) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) semester II dan DPP Mandatori Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK
- 3) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan
- 4) Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan tahun pajak sebelum tahun pajak 2024
- 5) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK
- 6) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 7) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis secara umum didorong oleh upaya-

upaya untuk menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK.

Meskipun target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti pengiriman undangan kegiatan realisasi LHP2DK sebelum tahun berjalan (komprehensif) belum optimal karena perubahan kebijakan penetapan DPP yang semula setiap triwulan menjadi setiap semesteran.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP

strategis merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti pembuatan LHPT dan/atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan dan penerbitan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan tahun pajak sebelum tahun pajak 2024.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu realisasi LHP2DK sebelum tahun berjalan (komprehensif) belum optimal karena perubahan kebijakan penetapan DPP yang semula setiap triwulan menjadi setiap semesteran. Hal ini telah diatasi dengan membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

○ **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

• **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan LHP2DK atas DPP outstanding yang belum selesai dan DPP semester I dan semester II
- 2) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP Mandatory yang telah ditetapkan
- 3) Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan tahun pajak sebelum tahun pajak 2024
- 4) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan
- 5) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 6) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK

b. IKU 6b-CP: Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Data STP Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target
- c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP

2) Pemanfaatan Data Matching

- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	118,76%	118,76%	119,37%	119,37%	119,67%	119,67%
Capaian	120,00%	118,76%	118,76%	119,37%	119,37%	119,67%	119,67%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Ketentuan mengenai IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024 terdapat dalam Nota Dineas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Penyampaian Panduan dan Penetapan Target Angka Mutlak Indikator Kinerja (IKU/IKI) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Tahun 2024 dan Panduan Penetapan Target dan Penghitungan Realisasi Komponen Pemanfaatan Data STP pada IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target persentase pemanfaatan data selain tahun

berjalan di tahun 2024 dengan realisasi 119,67% dari target sebesar 100%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	117,21%	119,67%

Sumber: Laporan Kinerja Organisasi KPP Madya Pekanbaru Tahun 2023 dan Dashboard Kinerja Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan KPP Madya Pekanbaru di tahun 2024 lebih tinggi 2,46% dibandingkan tahun lalu. Keberhasilan ini menunjukkan pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak yang lebih optimal.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	-	100,00%	119,67%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	100,00%	119,67%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap data daftar nominatif STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb.
- 2) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 3) Melakukan penelitian awal untuk mengetahui tingkat validitas data pemicu sebelum dimasukkan dalam usulan DPP Semester I
- 4) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Semester II Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK

- 5) Membuat LHPt dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan
- 6) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK
- 7) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 8) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK

○ **Analisis Penyebab Kerbehasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk melakukan pemantauan terhadap data daftar nominatif STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb dan menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK.

Meskipun target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti Dafnom STP yang terlambat muncul di Approweb.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti pembuatan LHPT dan/atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan dan penerbitan Surat Terguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan serta pemantauan terhadap data daftar nominatif STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti melakukan penelitian awal untuk mengetahui tingkat validitas data pemicu sebelum dimasukkan dalam usulan DPP.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase penyelesaian pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu daftar nominatif STP yang terlambat muncul di Approweb Hal ini telah diatasi dengan melakukan pemantauan terhadap data daftar nominatif STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.

- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pemantauan terhadap data daftar nominatif STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb
- 2) Menerbitkan Surat Teguran dan STP atas ketidakpatuhan pembayaran dan pelaporan
- 3) Melakukan penelitian awal untuk mengetahui tingkat validitas data pemicu sebelum dimasukkan dalam usulan DPP Semester I
- 4) Menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Semester I Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan DSP4. Penyusunan DPP mempertimbangkan data mandatori KPDJP, LHA Kanwil/KPDJP, WP Prioritas TP, CRM Pengawasan (X3Y3, X2Y3 dan X3Y2), Data Pemicu/Data Penguji, CRM ATP (ability to pay), Smartboard dan kebiasaan perilaku Wajib Pajak dalam menanggapi SP2DK
- 5) Membuat LHPT dan atau SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan data pemicu
- 6) Menyelesaikan permintaan data dan/atau keterangan dengan menerbitkan LHP2DK
- 7) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 8) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK

c. IKU 6c-N: Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	106,85%	106,85%	119,94%	119,94%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	106,85%	106,85%	119,94%	119,94%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target pengujian kepatuhan material yang efektif di tahun 2024 dengan realisasi 119,94% dari target sebesar 100%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	-	-	-	-	119,94%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pencapaian IKU pengujian kepatuhan material yang efektif ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	100,00%	-	100,00%	119,94%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	100,00%	100,00%	119,94%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi pengujian kepatuhan material yang efektif KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pengujian kepatuhan material yang efektif.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Membuat pengawasan manual KPP dalam bentuk Excel untuk mempermudah monitoring
- 2) Mengingatkan anggota komite melalui nota dinas satu minggu sebelum jatuh tempo pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan

○ **Analisis Penyebab Kerbehasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pengujian kepatuhan material yang efektif secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk memastikan pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan.

Meskipun target pengujian kepatuhan material yang efektif tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti keterlambatan penyampaian laporan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi pengujian kepatuhan material yang efektif adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase pengujian kepatuhan material yang efektif dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

○ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pengujian kepatuhan material yang efektif merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti melakukan monitoring manual dalam bentuk excel atas laporan pelaksanaan kegiatan.

○ **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase persentase pengujian kepatuhan material yang efektif pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti melakukan monitoring manual melalui excel agar tidak ada laporan yang lewat batas jatuh tempo.

○ **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase pengujian kepatuhan material yang efektif pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu Laporan Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak memiliki potensi keterlambatan dikarenakan data yang belum sepenuhnya sinkron di aplikasi pada masa periode pelaporan. Hal ini telah diatasi dengan membuat pengawasan manual dalam bentuk excel untuk mencegah terjadinya keterlambatan serta membuat nota dinas yang bersifat untuk mengingatkan penyampaian pelaporan.

○ **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah**

Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

o Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi pengujian kepatuhan material yang efektif beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Mengingatkan anggota komite melalui nota dinas satu minggu sebelum jatuh tempo pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan
- 2) Mengirimkan laporan sebelum tanggal jatuh tempo, jika ada perubahan/perbaikan akan dikirimkan nota dinas susulan

7. Penegakan hukum yang efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

a. IKU 7a-CP: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60\%)} \\ & + \\ & \text{(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40\%)} \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	115,96%	120,00%	120,00%	115,74%	115,74%	120,00%	120,00%
Capaian	115,96%	120,00%	120,00%	115,74%	115,74%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Ketentuan mengenai IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 terdapat dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tanggal 29 Februari 2024 hal Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan IKU Permintaan Bantuan Penilaian Tahun 2024. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2024 dengan realisasi 120,00% dari target sebesar 100%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	84,22%	99,41%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pencapaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 ini tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya, IKU ini hanya mengukur tingkat pemeriksaan saja.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan dan progress pemeriksaan secara berkala
- 2) Meminta bantuan penilaian terhadap transaksi atau data yang memerlukan penilaian
- 3) Mengikuti program asistensi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Riau atas tunggakan pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus.
- 4) Membuat Daftar Sasaran Prioritas Penilaian
- 5) Melakukan pembahasan dengan user yang meminta bantuan tenaga ahli
- 6) Melakukan kunjungan kerja ke Wajib Pajak yang dilakukan Penilaian

- **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk memaksimalkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian seperti monitoring penyelesaian pemeriksaan dan pembuatan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian.

Meskipun target efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti kurangnya tenaga ahli Fungsional Penilai Pajak di KPP Madya Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan dan membuat Daftar Sasaran Prioritas Penilaian.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti membuat monitoring tunggakan pemeriksaan.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu kurangnya tenaga ahli Fungsional Penilai Pajak di KPP Madya Pekanbaru. Namun, hal ini telah diatasi dengan mengajukan permintaan bantuan penilai kepada Kanwil DJP Riau.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.

- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

○ **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

● **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Mengusulkan penambahan tenaga ahli fungsional pajak
- 2) Mengoptimalkan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan selesai tepat waktu
- 3) Mengoptimalkan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Wajib Pajak

b. IKU 7b-CP: Tingkat Efektivitas Penagihan

• Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

• Realisasi IKU

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	68,99%	30,00%	30,00%	112,19%	112,19%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target efektivitas penagihan di tahun 2024 dengan realisasi 120,00% dari target sebesar 100%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	106,90%	114,80%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pencapaian IKU tingkat efektivitas penagihan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 120%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan *stakeholder* dan Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penagihan	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi tingkat efektivitas penagihan KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Pengiriman Surat Teguran tepat waktu kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan yang telah Jatuh Tempo
- 2) Penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak
- 3) Melakukan konseling terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam penunggak pajak terbesar
- 4) Melakukan penyitaan terhadap aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak
- 5) Melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk memaksimalkan efektivitas tindakan penagihan kepada Wajib Pajak.

Meskipun target efektivitas penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti:

- 1) Masih terdapat ketetapan yang belum inkrah sehingga belum dapat dilakukan tindakan penagihan
- 2) Beberapa Wajib Pajak telah melaporkan bahwa rekening mereka telah terblokir, namun pihak bank belum memberikan tanggapan terkait pemblokiran tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat efektivitas penagihan adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

○ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti pemberian konseling kepada Wajib Pajak yang masuk dalam penunggak pajak terbesar.

○ **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada piutang Wajib Pajak yang akan daluwarsa penagihan.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu masih terdapatnya ketetapan yang belum inkrah. Namun, hal ini telah diatasi dengan mengutamakan tindakan penagihan aktif kepada piutang Wajib Pajak yang akan daluwarsa penagihan terlebih dahulu.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi tingkat efektivitas penagihan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada piutang Wajib Pajak yang akan daluwarsa penagihan
- 2) Memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada 100 Wajib Pajak dengan jumlah piutang pajak terbesar dan dengan kriteria kualitas piutang pajak yang lancar sesuai DSPC
- 3) Melakukan asset tracing terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak
- 4) Melanjutkan kegiatan konseling dan visit ke Wajib Pajak
- 5) Mempercepat kegiatan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar IKU terlampaui

c. IKU 7b-N: Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	1,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-1885/WPJ.02/2024 tanggal 20 Desember 2024 hal Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, realiasi usulan bukti permulaan yang disetujui kantor wilayah sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak satu usulan. Dengan demikian, KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan di tahun 2024 sebesar 100%.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pencapaian IKU persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan di tahun 2024 ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini baru ada di tahun 2024.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 2) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 3) Kolaborasi dengan supervisor saat konseling atas SP2DK outstanding yang sulit cair
- 4) Melakukan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan atas WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk melaksanakan usulan bukti permulaan.

Meskipun target persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti tidak semua usul pemeriksaan bukti permulaan disetujui kantor wilayah.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti melakukan usulan pemeriksaan bukti permulaan atas Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK serta membahasnya bersama supervisor untuk SP2DK outstanding yang sulit cair.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti melakukan kolaborasi dengan supervisor saat konseling atas SP2DK outstanding yang sulit cair.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu

kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu tidak semua usul pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan disetujui oleh kantor wilayah. Namun, hal ini telah diatasi dengan tetap melakukan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pemanggilan dan konseling kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK.
- 2) Melakukan visit ke lokasi usaha kepada WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK
- 3) Kolaborasi dengan supervisor saat konseling atas SP2DK outstanding yang sulit cair
- 4) Melakukan usulan pemeriksaan Bukti Permulaan atas WP yang belum melaksanakan kewajiban sebagaimana SP2DK

8. Data dan Informasi yang berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

a. IKU 8a-CP: Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan

penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- a) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- b) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- c) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Produksi Alat Keterangan

Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain

pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:

- a) Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan identitas sejenis);
- b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan lampiran kelengkapannya.
- c) Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis transaksi pada alket.

Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1,2 dan jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan skor 1.

Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai berikut:

- g) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
- h) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
- i) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Produksi Alat Keterangan
$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	60,00%	60,00%	73,75%	73,75%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	92,19%	92,19%	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Target persentase penyelesaian laporan pengamatan KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 ditetapkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-733/WPJ.02/2024 tanggal 16 Juni 2024 hal Penerusan Penyampaian Penegasan terkait Ketentuan Indikator Kinerja

serta Target Angka Mutlak Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Pajak "Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan" Tahun 2024, yaitu sebanyak empat laporan.

Kemudian, target persentase produksi alat keterangan atau alket KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 ditetapkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-385/WPJ.02/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Penyampaian Target Angka Mutlak Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Produksi Alat Keterangan, yaitu sebanyak 340 alat keterangan.

Dari target-target yang telah ditetapkan tersebut, KPP Madya Pekanbaru berhasil meraih realisasi 120% di akhir tahun 2024.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pencapaian IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan tahun 2024 ini tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya, IKU ini hanya mengukur persentase penyelesaian laporan pengamatan atau bahkan tidak ada.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	100,00%	120,00%

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan

produksi alat keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menetapkan target produksi alat keterangan per-AR
- 2) Menentukan sasaran Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan
- 3) Melakukan pengamatan atas Wajib Pajak yang sudah ditentukan
- 4) Melakukan perekaman alket ke aplikasi

○ **Analisis Penyebab Kerbehasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan secara umum didorong oleh upaya-upaya untuk melakukan kegiatan pengamatan dan produksi alat keterangan.

Meskipun target penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti baru tersedianya menu perekaman Alket sesuai SE-12 pada aplikasi Alket SIDJP Nine sehingga dilakukan perekaman ulang atas alket yang sudah dibuat secara manual.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan,

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti melakukan pengamatan atas Wajib Pajak yang sudah ditentukan dan meningkatkan produksi alat keterangan per *Account Representative*.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti menentukan sasaran Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan dan merekam alket ke aplikasi.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi menu perekaman Alket sesuai SE-12 pada aplikasi Alket SIDJP Nine yang baru tersedia sehingga perlu dilakukan perekaman ulang atas alket yang sudah dibuat secara manual. Namun, hal ini telah diatasi dengan melakukan perekaman alket ke aplikasi.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.

- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan pengamatan atas wajib pajak yang sudah ditentukan
- 2) Melakukan perekaman alket ke aplikasi

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

a. IKU 9a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

- **Definisi IKU**

- 1) **Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- 2) **Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai

menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

• **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,84	116,84
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Berdasarkan data dari Dashboard Kinerja Organisasi, realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 sebesar 116,84. Sedangkan berdasarkan perhitungan manual versi unit, realisasi atas IKU tersebut adalah 120%.

Apabila terdapat perbedaan perhitungan antara Dashboard Kinerja Organisasi dengan perhitungan manual versi unit, unit yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-4699/PJ.01/2024 tanggal

30 Desember 2024 hal Panduan Penggunaan Dashboard Kinerja Organisasi pada Triwulan IV 2024 Sebagai Dasar Penerbitan Keputusan NKO Unit Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPP Madya Pekanbaru telah memberikan sanggahan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru nomor ND-158/KPP.0210/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Sanggahan Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Tahun 2024.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100,00%	116,84

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Pencapaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan SDM tahun 2024 ini tidak dapat sepenuhnya dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya, IKU ini hanya mengukur standar kompetensi atau menggunakan indikator lain yang berbeda.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	-	100,00%	116,84

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	100,00%	116,84

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Memastikan pelaksana dan *Account Representative* yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja, pendidikan. Gol/ruang, dan ketersediaan jabatan untuk diusulkan dalam sidang kenaikan grading.
 - 2) Memastikan Fungsional di Lingkungan KPP Madya Pekanbaru yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan diusulkan pada uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang jabatan.
 - 3) Memastikan Pejabat Eselon III dan IV mengikuti assessment sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - 4) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Uji Kompetensi.
 - 5) Memastikan pegawai menyelesaikan jamlat tatap muka dan modul studia
 - 6) Memastikan Pembinaan Mental dilaksanakan disetiap triwulan
- **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM secara umum didorong oleh upaya-upaya seluruh pegawai untuk melaksanakan manajemen kinerja pegawai dengan baik.

Meskipun target tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti belum semua pegawai dapat memenuhi indikator penilaian.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi persentase tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti monitoring penyelesaian jamlat tatap muka dan modul studia oleh pegawai serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Uji Kompetensi.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi persentase tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti melakukan monitoring penyelesaian jamlat tatap muka dan modul studia serta monitoring atas pelaksanaan pembinaan mental setiap triwulan.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi persentase tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai bukan

tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu masih adanya pegawai yang belum memenuhi indikator penilaian pada saat dilakukan uji kompetensi atau assessment. Namun, hal ini telah diatasi dengan memastikan pegawai menyelesaikan jamlat tatap muka dan modul studia sesuai target serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Uji Kompetensi.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Menyediakan sarana dan prasana yang dapat mendukung pegawai dalam rangka mempersiapkan Uji Kompetensi/Asessment
- 2) Memastikan kegiatan pembinaan mental terlaksana dengan baik sesuai target

b. IKU 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	92,99	92,99
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	109,39	109,39

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Berdasarkan data dari Dashboard Kinerja Organisasi, realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 sebesar 92,99 sehingga indeks capaiannya adalah 109,39

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	96,70	95,20	109,39

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan data dari tabel di atas, pencapaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mencapai angka tertinggi pada tahun 2024

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	85,00	109,39

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00	109,39

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi indeks penilaian integritas unit KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Membuat longlist responden survei penilaian integritas dengan kategori dan jumlah responden sesuai dengan ketentuan dari Direktorat KITSDA;
- 2) Mengirimkan longlist responden survei kepada Direktorat KITSDA dengan tepat waktu
- 3) Melakukan monitoring jumlah responden (Wajib Pajak) yang telah mengisi survei melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat KITSDA;

- 4) Berkoordinasi dengan Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam hal masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengisi survei:
- 5) Meminta bantuan Account Representative, Pemeriksa, dan Penyuluh untuk mengimbau dan mengkomunikasikan survei kepada responden (Wajib Pajak).

○ **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit secara umum didorong oleh upaya-upaya seluruh pegawai untuk menjaga integritasnya dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Meskipun target indeks penilaian integritas unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti sistematisa pelaksanaan survei yang tidak diketahui.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi indeks penilaian integritas unit adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

○ **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti melakukan monitoring jumlah responden (Wajib Pajak) yang telah mengisi survei melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat KITSDA.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti melakukan koordinasi dengan Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam hal masih terdapat Wajib Pajak yang belum mengisi survei.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu sistematisasi pelaksanaan survei yang tidak diketahui pasti. Namun, hal ini telah diatasi dengan membuat longlist responden survei penilaian integritas dengan kategori dan jumlah responden sesuai dengan ketentuan dari Direktorat KITSDA dengan terlebih dahulu berkoordinasi bersama seksi-seksi terkait.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

○ **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

● **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi indeks penilaian integritas unit, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Senantiasa melaksanakan *public campaign* penguatan integritas kepada seluruh pegawai dan Wajib Pajak;

- 2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Seksi Pelayanan, Pengawasan, dan Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terkait pemilihan responden dan pelaksanaan survei.

c. IKU 9c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- **Definisi IKU**

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	100,11%		

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	31,05	70,18	70,18	87,81	87,81	100,00	100,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,11	111,11

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Berdasarkan data dari Dashboard Kinerja Organisasi, realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 sebesar 92,99 sehingga indeks capaiannya adalah 109,39

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	100,00%	100,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2023 menggunakan satuan persen sedangkan di tahun 2024 menggunakan indeks. Baik di tahun 2023 maupun 2024, KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan indeks realisasi 100,00.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	-	90,00	100,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	90,00	90,00	100,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Madya Pekanbaru berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - 1) Melaksanakan rapat pembentukan manajemen risiko
 - 2) Menetapkan Piagam Manajemen Risiko
 - 3) Melaksanakan realisasi manajemen risiko triwulanan
 - 4) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan kinerja triwulanan
 - 5) Melaksanakan imbauan terkait manajemen kinerja
 - 6) Melaksanakan DKO triwulanan
 - **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**
Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko secara

umum didorong oleh upaya-upaya seluruh pegawai untuk mendukung pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan mitigasi risiko.

Meskipun target indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti kompleksitas data yang diperlukan untuk menjalankan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko unit adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas kinerja realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti melakukan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi tepat waktu.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti berkoordinasi dengan seluruh seksi terkait dalam menyiapkan data untuk melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu banyak dan kompleksnya data yang dibutuhkan untuk melaksanakan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko. Namun, hal ini telah diatasi dengan membuat nota dinas kepada seksi-seksi terkait untuk mengumpulkan data dan bukti pendukung pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum,

serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

- **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesenjangan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan rapat pembentukan manajemen risiko
- 2) Menetapkan Piagam Manajemen Risiko
- 3) Memastikan pegawai memenuhi kejadian risiko yang telah ditetapkan setiap triwulan

- 4) Memastikan pegawai melaksanakan kewajiban pengelolaan kinerja tepat waktu
- 5) Memastikan setiap seksi mengirimkan Laporan Penjelasan Progress IKU, Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis, Bukti Pendukung, dan Matriks Tindak Lanjut secara lengkap sebelum pelaksanaan DKRO

10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

a. IKU 10a-CP: Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024

ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)			
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$	
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$	
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	

- **Realisasi IKU**

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024 adalah sebagai berikut.

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	78,95	105,16	105,16	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	78,95	105,16	105,16	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi per 10 dan 14 Januari 2025

Berdasarkan data dari Dashboard Kinerja Organisasi, realisasi IKU pengelolaan keuangan yang akuntabel KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 sebesar 120,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran KPP Madya Pekanbaru sangat baik.

- **Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	94,99%	99,39	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Berdasarkan data pada tabel tersebut, kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Madya Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahu ke tahun dengan realisasi capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024.

- **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	-	100,00	116,84

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	100,00	20,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi

Hingga akhir Desember 2024, realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor dan komitmen seluruh pegawai.

- **Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**
 - **Analisis Upaya-Upaya *Extra effort* yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Perencanaan belanja dan melaksanakan revisi Hal III DIPA setiap awal triwulan.
- 2) Melaksanakan penyerapan anggaran pada Triwulan III sesuai Rencana Penarikan Dana pada Hal III DIPA sesuai PER-5/PB/2022 (70% Belanja Pegawai, Belanja Modal 70% dan 70% Belanja Barang)
- 3) Pengelolaan Uang Persediaan secara tepat waktu dan akurasi besaran UP dan TUP.
- 4) Melakukan perekaman belanja kontraktual tepat waktu
- 5) Ketepatan Waktu penyelesaian Tagihan untuk SPM-LS Kontraktual
- 6) Mengisi Capaian Output Tepat Waktu
- 7) Berkoordinasi dan bersinergi antar pegawai tim keuangan dan operator SPMKP di seksi pelayanan terkait tupoksi,

penyerapan belanja barang, belanja modal, maupun belanja pegawai, dan pencapaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran.

- **Analisis Penyebab Kerhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan/peningkatan kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran secara umum didorong oleh upaya-upaya mengenai perencanaan belanja, penyerapan anggaran, pengelolaan uang persediaan, dan koordinasi antar pegawai tim keuangan dan operator SPMKP.

Meskipun target indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul, seperti penyerapan belanja pegawai dan belanja barang belum memenuhi target.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah dengan melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian atas indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi, seperti:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024, seperti perencanaan belanja, penyerapan anggaran, pengelolaan uang persediaan, dan koordinasi antar pegawai tim keuangan dan operator SPMKP.

- **Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang Telah Disusun pada Periode Sebelumnya dalam Pencapaian Kinerja**

Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi seperti berkoordinasi dan bersinergi antar pegawai tim keuangan dan operator SPMKP di seksi pelayanan terkait tupoksi, penyerapan belanja barang, belanja modal, maupun belanja pegawai dan pencapaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran.

- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**

Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi yaitu penyerapan belanja pegawai dan belanja barang belum memenuhi target. Namun, hal ini telah diatasi dengan melaksanakan penyerapan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana pada Hal III DIPA sesuai PER-5/PB/2022.

- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, Dan Manfaat Pencapaian IKU Dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, And Social Inclusion (GEDSI) Seperti Misalnya Data Terpilah Maupun Berkebutuhan Khusus Baik Pengguna Layanan Maupun Penerima Manfaat**

Pajak berperan dalam mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Beberapa kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti akses disabilitas di tempat umum, serta memberikan insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial untuk kelompok yang membutuhkan, seperti program jaring pengaman sosial.

○ **Analisis Dukungan IKU Terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan dalam Isu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pencegahan Stunting, Kesetaraan Gender, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Sebagai sumber pendapatan utama dalam APBN, pajak dapat mendukung isu-isu tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, serta memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak dapat menjadi sumber anggaran untuk sektor kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat.
- 3) Pajak menyediakan dana untuk proyek pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di daerah terpencil, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai.

- **Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Dalam memaksimalkan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan KPP Madya Pekanbaru untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- 1) Operator SAKTI dalam membuat SPM terlebih dahulu mengecek data supplier terutama nama pemilik rekening pada <https://spanint.kemenkeu.go.id/>
- 2) Berkoordinasi dengan tim keuangan terkait penyerapan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

B. Realisasi Anggaran

Berikut adalah realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan KPP Madya Pekanbaru untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi ini merupakan data yang bersumber dari aplikasi sakti Kementerian Keuangan.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,839,137,000	0	5,088,858,135	449,712,758	5,538,570,893	94.85 %	300,566,107
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	937,815,000	0	757,880,541	74,704,706	832,585,247	88.78 %	105,229,753
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	322,440,000	0	296,818,819	7,948,750	304,767,569	94.52 %	17,672,431
BMB Komunikasi Publik	322,440,000	0	296,818,819	7,948,750	304,767,569	94.52 %	17,672,431
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	235,090,000	0	212,459,262	6,298,750	218,758,012	93.05 %	16,331,988
100 Tidak Ada Komponen	235,090,000	0	212,459,262	6,298,750	218,758,012	93.05 %	16,331,988
100.OA KPP Madya Pekanbaru	235,090,000	0	212,459,262	6,298,750	218,758,012	93.05 %	16,331,988
521211 Belanja Bahan	85,923,000	0	83,827,202	2,050,000	85,877,202	99.95 %	45,798
000006. Makan Rapat Biasa RIAU	9,092,000	0	9,092,000	0	9,092,000	100.00	0
000007. Snack Rapat Biasa RIAU	4,499,000	0	4,499,000	0	4,499,000	100.00	0
000008. Seminar Kit	72,332,000	0	70,236,202	2,050,000	72,286,202	99.94 %	45,798
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	147,767,000	0	127,232,060	4,248,750	131,480,810	88.98 %	16,286,190
000009. Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi	13,601,000	0	13,600,900	0	13,600,900	100.00	100
000010. Iklan/Spanduk/Banner	14,166,000	0	11,807,000	2,358,750	14,165,750	100.00	250
000011. ICV	66,000,000	0	61,138,500	1,890,000	63,028,500	95.50 %	2,971,500
000012. IHT	54,000,000	0	40,685,660	0	40,685,660	75.34 %	13,314,340
522151 Belanja Jasa Profesi	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000013. Honor Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan)	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	87,350,000	0	84,359,557	1,650,000	86,009,557	98.47 %	1,340,443
100 Tanpa Komponen	87,350,000	0	84,359,557	1,650,000	86,009,557	98.47 %	1,340,443
100.OA KPP Madya Pekanbaru	87,350,000	0	84,359,557	1,650,000	86,009,557	98.47 %	1,340,443
521211 Belanja Bahan	7,343,000	0	7,342,500	0	7,342,500	99.99 %	500
000001. Makan Rapat Biasa RIAU	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000002. Snack Rapat Biasa RIAU	3,343,000	0	3,342,500	0	3,342,500	99.99 %	500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,530,000	0	25,516,600	0	25,516,600	99.95 %	13,400
000003. Sarana Pendukung Penyuluhan kepada Wajib Pajak	25,530,000	0	25,516,600	0	25,516,600	99.95 %	13,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 2 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,705,000	0	27,520,457	0	27,520,457	95.87 %	1,184,543
	000004. Perjalanan Dinas	28,705,000	0	27,520,457	0	27,520,457	95.87 %	1,184,543
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,772,000	0	23,980,000	1,650,000	25,630,000	99.45 %	142,000
	000005. Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	25,772,000	0	23,980,000	1,650,000	25,630,000	99.45 %	142,000
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	615,375,000	0	461,061,722	66,755,956	527,817,678	85.77 %	87,557,322
BCE	Penanganan Perkara	79,634,000	0	71,409,800	7,288,000	78,697,800	98.82 %	936,200
BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	79,634,000	0	71,409,800	7,288,000	78,697,800	98.82 %	936,200
100	Tidak Ada Komponen	79,634,000	0	71,409,800	7,288,000	78,697,800	98.82 %	936,200
100.OA	KPP Madya Pekanbaru	79,634,000	0	71,409,800	7,288,000	78,697,800	98.82 %	936,200
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,000,000	0	15,250,000	6,400,000	21,650,000	98.41 %	350,000
	000014. Lelang Penagihan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
	000016. Biaya Penyampaian SP dan SPMP	20,000,000	0	13,250,000	6,400,000	19,650,000	98.25 %	350,000
522141	Belanja Sewa	2,731,000	0	2,730,056	0	2,730,056	99.97 %	944
	000017. Sewa Kendaraan Roda 4 (Riau)	2,731,000	0	2,730,056	0	2,730,056	99.97 %	944
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,793,000	0	53,319,744	888,000	54,207,744	98.93 %	585,256
	000019. Perjalanan Dinas Biasa	54,793,000	0	53,319,744	888,000	54,207,744	98.93 %	585,256
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110,000	0	110,000	0	110,000	100.00	0
	000020. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	110,000	0	110,000	0	110,000	100.00	0
BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	535,741,000	0	389,651,922	59,467,956	449,119,878	83.83 %	86,621,122
BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	222,509,000	0	174,180,189	14,395,956	188,576,145	84.75 %	33,932,855
100	Tidak Ada Komponen	222,509,000	0	174,180,189	14,395,956	188,576,145	84.75 %	33,932,855
100.OA	KPP Madya Pekanbaru	222,509,000	0	174,180,189	14,395,956	188,576,145	84.75 %	33,932,855
521211	Belanja Bahan	3,300,000	0	1,625,100	0	1,625,100	49.25 %	1,674,900
	000021. Makan Rapat Biasa RIAU	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
	000022. Snack Rapat Biasa RIAU	2,800,000	0	1,625,100	0	1,625,100	58.04 %	1,174,900
522141	Belanja Sewa	9,780,000	0	900,000	0	900,000	9.20 %	8,880,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 3 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000023. Sewa Kendaraan Roda 4 RIAU	9,780,000	0	900,000	0	900,000	9.20 %	8,880,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197,429,000	0	162,855,089	12,855,956	175,711,045	89.00 %	21,717,955
000025. Perjalanan Dinas Biasa	197,429,000	0	162,855,089	12,855,956	175,711,045	89.00 %	21,717,955
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000	0	8,800,000	1,540,000	10,340,000	86.17 %	1,660,000
000026. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	12,000,000	0	8,800,000	1,540,000	10,340,000	86.17 %	1,660,000
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	282,840,000	0	188,423,348	43,279,625	231,702,973	81.92 %	51,137,027
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	282,840,000	0	188,423,348	43,279,625	231,702,973	81.92 %	51,137,027
005.0A KPP Madya Pekanbaru	282,840,000	0	188,423,348	43,279,625	231,702,973	81.92 %	51,137,027
521211 Belanja Bahan	4,700,000	0	1,323,000	0	1,323,000	28.15 %	3,377,000
000031. Makan Rapat Biasa RIAU	3,000,000	0	392,000	0	392,000	13.07 %	2,608,000
000032. Snack Rapat Biasa RIAU	1,700,000	0	931,000	0	931,000	54.76 %	769,000
522141 Belanja Sewa	13,940,000	0	3,752,000	0	3,752,000	26.92 %	10,188,000
000033. Sewa Kendaraan Roda Empat RIAU	13,940,000	0	3,752,000	0	3,752,000	26.92 %	10,188,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240,000,000	0	179,388,348	27,549,625	206,937,973	86.22 %	33,062,027
000035. Perjalanan Dinas Biasa	240,000,000	0	179,388,348	27,549,625	206,937,973	86.22 %	33,062,027
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,200,000	0	3,960,000	15,730,000	19,690,000	81.36 %	4,510,000
000036. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	24,200,000	0	3,960,000	15,730,000	19,690,000	81.36 %	4,510,000
BIG.005 Laporan Penilaian	30,392,000	0	27,048,385	1,792,375	28,840,760	94.90 %	1,551,240
100 Tidak Ada Komponen	30,392,000	0	27,048,385	1,792,375	28,840,760	94.90 %	1,551,240
100.0A KPP Madya Pekanbaru	30,392,000	0	27,048,385	1,792,375	28,840,760	94.90 %	1,551,240
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,062,000	0	26,718,385	1,792,375	28,510,760	94.84 %	1,551,240
000029. Perjalanan Dinas Biasa	30,062,000	0	26,718,385	1,792,375	28,510,760	94.84 %	1,551,240
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330,000	0	330,000	0	330,000	100.00	0
000030. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	330,000	0	330,000	0	330,000	100.00	0
WAProgram Dukungan Manajemen	4,901,322,000	0	4,330,977,594	375,008,052	4,705,985,646	96.01 %	195,336,354
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,034,108,000	0	3,598,388,594	300,713,052	3,899,101,646	96.65 %	135,006,354

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 4 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	100.00	0
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	100.00	0
100 Tidak ada komponen	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	100.00	0
100.0A KPP Madya Pekanbaru	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	100.00	0
000149. Printer Multifungsi	33,400,000	0	33,400,000	0	33,400,000	100.00	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,662,862,000	0	3,238,942,744	288,945,276	3,527,888,020	96.32 %	134,973,980
EBA.001 Kerumahtanggaan	279,522,000	0	243,980,361	16,631,395	260,611,756	93.23 %	18,910,244
100 Tidak Ada Komponen	279,522,000	0	243,980,361	16,631,395	260,611,756	93.23 %	18,910,244
100.0A KPP Madya Pekanbaru	279,522,000	0	243,980,361	16,631,395	260,611,756	93.23 %	18,910,244
521211 Belanja Bahan	23,398,000	0	19,737,628	2,684,000	22,421,628	95.83 %	976,372
000092. Makan Rapat Biasa	8,000,000	0	7,934,020	0	7,934,020	99.18 %	65,980
000093. Snack Rapat Biasa	15,398,000	0	11,803,608	2,684,000	14,487,608	94.09 %	910,392
522151 Belanja Jasa Profesi	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000094. Honorarium Rohaniwan	1,600,000	0	0	0	0	0.00 %	1,600,000
000150. Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	233,124,000	0	213,352,733	5,697,395	219,050,128	93.96 %	14,073,872
000095. Perjalanan Dinas Biasa	233,124,000	0	213,352,733	5,697,395	219,050,128	93.96 %	14,073,872
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,500,000	0	10,890,000	8,250,000	19,140,000	93.37 %	1,360,000
000096. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	20,500,000	0	10,890,000	8,250,000	19,140,000	93.37 %	1,360,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,383,340,000	0	2,994,962,383	272,313,881	3,267,276,264	96.57 %	116,063,736
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,383,340,000	0	2,994,962,383	272,313,881	3,267,276,264	96.57 %	116,063,736
002.0A KPP Madya Pekanbaru	3,383,340,000	0	2,994,962,383	272,313,881	3,267,276,264	96.57 %	116,063,736
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,675,197,000	0	1,552,042,345	115,562,330	1,667,604,675	99.55 %	7,592,325
000037. Pakaian Dinas Pegawai RIAU	214,896,000	0	214,896,000	0	214,896,000	100.00	0
000038. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	2,000,000	0	1,170,000	750,000	1,920,000	96.00 %	80,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 5 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000039. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti RIAU	11,988,000	0	11,988,000	0	11,988,000	100.00	0
000040. Pakaian Kerja Satpam RIAU	23,976,000	0	23,976,000	0	23,976,000	100.00	0
000041. Pulsa untuk Pelayanan WP	1,380,000	0	790,500	98,216	888,716	64.40 %	491,284
000045. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai RIAU	166,100,000	0	142,192,231	23,898,444	166,090,675	99.99 %	9,325
000046. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	15,000,000	0	8,034,000	4,836,000	12,870,000	85.80 %	2,130,000
000106. Jasa Cleaning Service/Petugas kebersihan	311,778,000	0	311,777,975	0	311,777,975	100.00	25
000107. Jasa Keamanan dan Pengemudi	395,406,000	0	395,405,802	0	395,405,802	100.00	198
000108. Jasa Dokter	18,000,000	0	16,125,000	1,500,000	17,625,000	97.92 %	375,000
000109. Tes Urine	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000	100.00	0
000151. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti RIAU	207,096,000	0	172,579,200	34,515,840	207,095,040	100.00	960
000152. Honorarium Satpam dan Pengemudi RIAU	291,797,000	0	242,828,310	48,576,885	291,405,195	99.87 %	391,805
000153. Pengharum Ruangan	12,000,000	0	6,499,327	1,386,945	7,886,272	65.72 %	4,113,728
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	138,383,000	0	74,018,869	11,944,500	85,963,369	62.12 %	52,419,631
000047. Pengiriman Surat Dinas	138,383,000	0	74,018,869	11,944,500	85,963,369	62.12 %	52,419,631
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,816,000	0	60,470,000	10,552,000	71,022,000	86.81 %	10,794,000
000048. Honorarium Anggota Petugas (UAKPA/Barang)	2,160,000	0	1,500,000	240,000	1,740,000	80.56 %	420,000
000049. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang	2,160,000	0	1,500,000	240,000	1,740,000	80.56 %	420,000
000050. Honorarium Staf Pengelola (Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar)	13,824,000	0	9,600,000	1,536,000	11,136,000	80.56 %	2,688,000
000051. Honorarium Bendahara Pengeluaran (Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar)	6,192,000	0	4,300,000	688,000	4,988,000	80.56 %	1,204,000
000052. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	1,000,000	160,000	1,160,000	80.56 %	280,000
000053. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,800,000	0	1,250,000	200,000	1,450,000	80.56 %	350,000
000054. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan SPM (Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar)	7,128,000	0	4,950,000	792,000	5,742,000	80.56 %	1,386,000
000055. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar)	18,648,000	0	12,950,000	2,072,000	15,022,000	80.56 %	3,626,000
000056. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar)	18,144,000	0	15,120,000	3,024,000	18,144,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 6 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000057. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
	000058. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	2,160,000	0	1,500,000	240,000	1,740,000	80.56 %	420,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	83,000,000	0	58,082,695	23,942,700	82,025,395	98.83 %	974,605
	000059. Jasa Kearsipan	22,000,000	0	11,100,000	10,878,000	21,978,000	99.90 %	22,000
	000060. Penggandaan dan Penjilidan	41,000,000	0	40,077,395	0	40,077,395	97.75 %	922,605
	000182. Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi	20,000,000	0	6,905,300	13,064,700	19,970,000	99.85 %	30,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	270,711,000	0	245,552,847	16,149,697	261,702,544	96.67 %	9,008,456
	000061. Meterai Tempel	2,030,000	0	1,711,470	310,000	2,021,470	99.58 %	8,530
	000062. Barang Cetakan	41,000,000	0	39,988,000	0	39,988,000	97.53 %	1,012,000
	000063. Barang Konsumsi ATK	133,681,000	0	122,620,587	10,681,230	133,301,817	99.72 %	379,183
	000064. Obat-obatan	50,000,000	0	42,131,190	5,158,467	47,289,657	94.58 %	2,710,343
	000065. Perlengkapan Printer	44,000,000	0	39,101,600	0	39,101,600	88.87 %	4,898,400
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	0	411,707,274	37,217,810	448,925,084	99.76 %	1,074,916
	000066. Langganan Listrik	450,000,000	0	411,707,274	37,217,810	448,925,084	99.76 %	1,074,916
522112	Belanja Langganan Telepon	70,121,000	0	55,258,340	5,168,478	60,426,818	86.18 %	9,694,182
	000067. Langganan Telepon	70,121,000	0	55,258,340	5,168,478	60,426,818	86.18 %	9,694,182
522141	Belanja Sewa	180,966,000	0	157,539,636	19,472,286	177,011,922	97.82 %	3,954,078
	000068. Sewa Mesin Fotokopi Digital	126,000,000	0	112,473,636	9,593,286	122,066,922	96.88 %	3,933,078
	000069. Sewa Bunga	21,000,000	0	11,100,000	9,879,000	20,979,000	99.90 %	21,000
	000070. Sewa Gudang Berkas	33,966,000	0	33,966,000	0	33,966,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	418,146,000	0	373,272,877	31,310,080	404,582,957	96.76 %	13,563,043
	000072. Tabung Pemadam Api	7,500,000	0	5,411,250	0	5,411,250	72.15 %	2,088,750
	000073. Faksimili	1,680,000	0	1,576,200	0	1,576,200	93.82 %	103,800
	000074. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan) RIAU	35,000,000	0	30,053,694	2,190,000	32,243,694	92.12 %	2,756,306
	000075. Pemeliharaan AC Stand	12,000,000	0	11,710,500	0	11,710,500	97.59 %	289,500
	000076. Pemeliharaan AC Split	25,620,000	0	24,522,780	0	24,522,780	95.72 %	1,097,220

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 7 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000077. Pemeliharaan Genset 150 KVA	10,046,000	0	9,569,500	430,000	9,999,500	99.54 %	46,500
000078. Pemeliharaan Inventaris Kantor	8,400,000	0	3,152,485	5,236,000	8,388,485	99.86 %	11,515
000079. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	75,000,000	0	66,774,795	5,729,095	72,503,890	96.67 %	2,496,110
000080. Pemeliharaan Printer	27,600,000	0	25,401,050	1,255,000	26,656,050	96.58 %	943,950
000081. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 RIAU	36,700,000	0	31,613,363	3,987,017	35,600,380	97.00 %	1,099,620
000082. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 RIAU	140,000,000	0	127,092,960	12,082,968	139,175,928	99.41 %	824,072
000083. Telepon	6,400,000	0	6,292,400	0	6,292,400	98.32 %	107,600
000084. Sound System	2,000,000	0	325,000	400,000	725,000	36.25 %	1,275,000
000085. Pemeliharaan Scanner	5,000,000	0	4,950,600	0	4,950,600	99.01 %	49,400
000086. Perangkat CCTV	15,000,000	0	14,814,100	0	14,814,100	98.76 %	185,900
000087. PABX Unit	2,000,000	0	1,953,600	0	1,953,600	97.68 %	46,400
000088. Mesin Presensi	2,000,000	0	1,864,800	0	1,864,800	93.24 %	135,200
000089. Mesin Penghancur Kertas	4,200,000	0	4,195,800	0	4,195,800	99.90 %	4,200
000090. Mesin Antrian	2,000,000	0	1,998,000	0	1,998,000	99.90 %	2,000
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,000,000	0	7,017,500	994,000	8,011,500	53.41 %	6,988,500
000091. Pembelian BBM Genset	15,000,000	0	7,017,500	994,000	8,011,500	53.41 %	6,988,500
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	337,846,000	0	326,045,850	11,767,776	337,813,626	99.99 %	32,374
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	337,846,000	0	326,045,850	11,767,776	337,813,626	99.99 %	32,374
100 Tidak Ada Komponen	337,846,000	0	326,045,850	11,767,776	337,813,626	99.99 %	32,374
100.0A KPP Madya Pekanbaru	337,846,000	0	326,045,850	11,767,776	337,813,626	99.99 %	32,374
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337,846,000	0	326,045,850	11,767,776	337,813,626	99.99 %	32,374
000154. AC Split 2 PK	26,320,000	0	26,319,700	0	26,319,700	100.00	300
000155. Garmin GPS	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	100.00	0
000156. Infocus	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000	100.00	0
000157. Kursi Aula	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	100.00	0
000158. Layar Infocus	7,575,000	0	7,575,000	0	7,575,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Hal 8 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000159. Mixer Audio	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
000160. Microphone Set	9,750,000	0	9,750,000	0	9,750,000	100.00	0
000161. Meja Kerja Kepala Kantor	10,037,000	0	10,036,620	0	10,036,620	100.00	380
000162. AC Split 1/2 PK	5,495,000	0	5,494,500	0	5,494,500	99.99 %	500
000163. Kamera	22,100,000	0	22,100,000	0	22,100,000	100.00	0
000164. Lensa Kamera	17,462,000	0	17,462,000	0	17,462,000	100.00	0
000165. Monitor PC	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
000166. Televisi 43 Inch	16,300,000	0	16,300,000	0	16,300,000	100.00	0
000167. Acces Point	2,720,000	0	2,719,500	0	2,719,500	99.98 %	500
000168. Meja Sekretaris	8,455,000	0	8,454,870	0	8,454,870	100.00	130
000169. Kursi Pegawai	5,035,000	0	5,034,960	0	5,034,960	100.00	40
000170. Mesin Penghancur Kertas	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
000171. Sofa Tunggu Ruang Sekretaris	12,309,000	0	12,308,790	0	12,308,790	100.00	210
000172. Lemari Berkas Ruang Sekretaris	19,481,000	0	19,480,500	0	19,480,500	100.00	500
000173. Lemari Kayu	5,000,000	0	4,995,000	0	4,995,000	99.90 %	5,000
000174. Kursi TPT Hadap	6,150,000	0	0	6,142,740	6,142,740	99.88 %	7,260
000177. Lemari Berkas Ruang Pengawasan	44,955,000	0	44,955,000	0	44,955,000	100.00	0
000180. Meja Pegawai	6,695,000	0	6,694,410	0	6,694,410	99.99 %	590
000183. Kusi Tamu Ruang Sekretaris	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000	100.00	0
000184. Lemari Berkas Ruangan Fungsional	14,985,000	0	14,985,000	0	14,985,000	100.00	0
000185. Kursi TPT Pegawai	5,630,000	0	0	5,625,036	5,625,036	99.91 %	4,964
000186. Air Purifier	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	100.00	0
000187. Dispenser	3,062,000	0	3,050,000	0	3,050,000	99.61 %	12,000
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	867,214,000	0	732,589,000	74,295,000	806,884,000	93.04 %	60,330,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	867,214,000	0	732,589,000	74,295,000	806,884,000	93.04 %	60,330,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	867,214,000	0	732,589,000	74,295,000	806,884,000	93.04 %	60,330,000
001 Gaji dan Tunjangan	867,214,000	0	732,589,000	74,295,000	806,884,000	93.04 %	60,330,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 440904 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001.OA	KPP Madya Pekanbaru	867,214,000	0	732,589,000	74,295,000	806,884,000	93.04 %	60,330,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	804,800,000	0	687,425,000	70,202,000	757,627,000	94.14 %	47,173,000
	000097. Uang Makan Golongan II	203,000,000	0	178,829,000	16,240,000	195,069,000	96.09 %	7,931,000
	000098. Uang Makan Golongan III	425,500,000	0	364,194,000	38,628,000	402,822,000	94.67 %	22,678,000
	000099. Uang Makan Golongan IV	176,300,000	0	144,402,000	15,334,000	159,736,000	90.60 %	16,564,000
512211	Belanja Uang Lembur	62,414,000	0	45,164,000	4,093,000	49,257,000	78.92 %	13,157,000
	000100. Uang Lembur Golongan II	28,800,000	0	22,392,000	2,016,000	24,408,000	84.75 %	4,392,000
	000101. Uang Lembur Golongan III	16,950,000	0	10,560,000	1,320,000	11,880,000	70.09 %	5,070,000
	000102. Uang Lembur Golongan IV	7,344,000	0	5,688,000	360,000	6,048,000	82.35 %	1,296,000
	000103. Uang Makan Lembur PNS Golongan I dan II	3,570,000	0	2,520,000	245,000	2,765,000	77.45 %	805,000
	000104. Uang Makan Lembur PNS Golongan III	3,700,000	0	2,405,000	111,000	2,516,000	68.00 %	1,184,000
	000105. Uang Makan Lembur PNS Golongan IV	2,050,000	0	1,599,000	41,000	1,640,000	80.00 %	410,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

C. Efisiensi Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), KPP Madya Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan teknologi digital dalam proses administrasi perpajakan dengan menciptakan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membangun basis data untuk memudahkan analisis pekerjaan. Hal ini bertujuan agar kegiatan administrasi perpajakan dapat dijalankan secara lebih efisien. Aplikasi yang mendukung otomatisasi dapat membantu memudahkan dan mempercepat proses, sementara basis data yang dibangun dapat mempermudah analisis dan pemantauan pekerjaan.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran sudah disesuaikan dengan tujuan kinerja yang ingin dicapai. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pemborosan dalam penggunaan dana tersebut.
3. Memberikan himbauan untuk menggunakan sumber daya listrik secukupnya. Himbauan ini bertujuan untuk menghemat energi dengan cara yang sederhana, yaitu mematikan perangkat elektronik seperti komputer, lampu, atau alat lain yang tidak digunakan. Dengan mengurangi konsumsi listrik yang tidak perlu, hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional kantor serta mendukung upaya pelestarian energi dan lingkungan.

D. Kinerja Lain-Lain

Sepanjang tahun 2024, KPP Madya Pekanbaru telah memperoleh penghargaan skala regional, sebagai berikut.

1. Ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik I di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024
2. Penghargaan atas Pencapaian 100% Target Penerimaan Pajak Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPP Madya Pekanbaru di Tahun Anggaran 2024 adalah sangat baik. KPP Madya Pekanbaru berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan selama empat tahun berturut-turut. Tak hanya itu, capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diamanatkan kepada KPP Madya Pekanbaru di Tahun Anggaran 2024 pun hampir melampaui semua target yang telah ditentukan. Besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai oleh KPP Madya Pekanbaru tahun 2024 telah melampaui target dengan indeks capaian 107,80.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi masih terdapat satu indikator berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja KPP Madya Pekanbaru pada tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat memperoleh umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang KPP Madya Pekanbaru dapat memperoleh dukungan lebih dari berbagai pihak yang diperlukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

LAMPIRAN

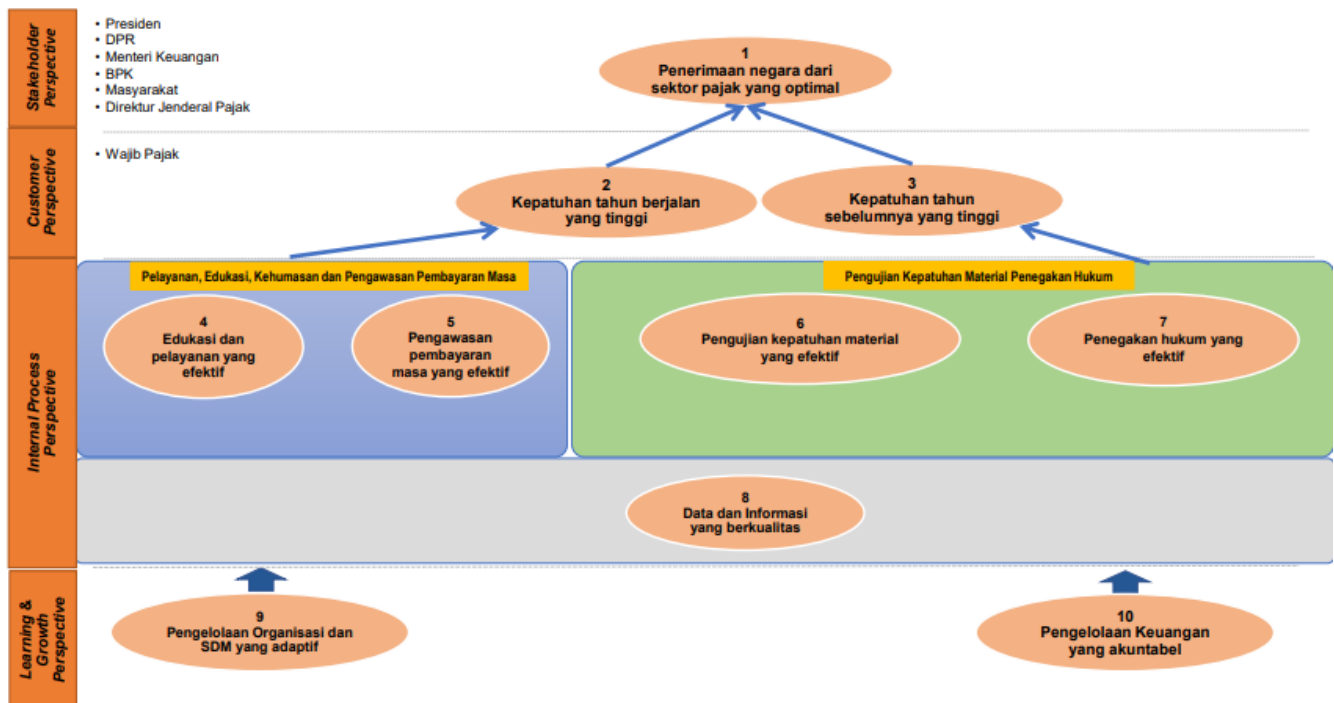


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WPJ.02/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.364.957.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 270.520.000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.094.437.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 4.217.304.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.348.474.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 868.830.000
Total	Rp 5.582.261.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Riau,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ahmad Djamhari

Pekanbaru, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Pekanbaru,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Winardi



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	51%	51%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	51%	51%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Pekanbaru, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya
Pekanbaru,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Winardi



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada WP terdaftar maupun WP lainnya agar memahami pentingnya pajak Bagi pembangunan dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar	<i>Output:</i> Kegiatan Penyuluhan dan Perubahan Perilaku WP yang tidak lapor menjadi lapor dan tidak bayar menjadi bayar <i>Outcome:</i> Perubahan Perilaku Wajib Pajak yang diberikan edukasi dan penyuluhan	Q1: 1. Menyusun DSPT 2. Menyusun program Penyuluhan 3. Menyusun materi Penyuluhan 4. Melaksanakan Penyuluhan Q2: 1. Mengimbau WP yang belum wajib menyampaikan SPT Tahunan 2. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan tidak langsung dua arah melalui media sosial (<i>Instagram Live</i>) 3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan tidak	Q1: 1. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih 2. Program Penyuluhan 3. Materi Penyuluhan 4. Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan di Aplikasi Sisuluh Q2: 1. Surat Imbauan 2. Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan di Aplikasi Sisuluh 3. Poster, leaflet, selebaran dan/atau brosur	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	DIPA Sarana Pendukung Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Rp. 23.590.000



				langsung satu arah melalui media visual dalam bentuk poster, leaflet, selebaran dan/atau brosur Q3: 1. Mengimbau WP yang belum wajib menyampaikan SPT Tahunan 2. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan tidak langsung dua arah melalui media sosial (Instagram Live) 3. Melaksanak kegiatan penyuluhan tidak langsung satu arah melalui media visual dalam bentuk poster, leaflet, selebaran dan/atau brosur Q4: 1. Mengimbau WP yang belum wajib	Q3: 1. Surat Imbauan 2. Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan di Aplikasi Sisuluh 3. Poster, leaflet, selebaran dan/atau brosur Q4: 1. Surat Imbauan 2. Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan di Aplikasi Sisuluh 3. Evaluasi Hasil Kegiatan penyuluhan			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



				menyampaikan SPT Tahunan 2. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan tidak langsung dua arah melalui media sosial (Instagram Live) 3. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penyuluhan				
2	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Menyusun program pemeriksaan sesuai identifikasi permasalahan dan cakupan yang telah ditentukan; menyiapkan dan mempelajari data wajib pajak sebelum visit ke tempat Wajib Pajak	<i>Output:</i> 1. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan 2. Laporan Penilaian yang bermanfaat dalam kegiatan pemeriksaan <i>Outcome:</i> 1. Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan 2. Tercapainya angka konversi Fungsional Pemeriksa Pajak	Q1: 1. Menetapkan DSPP 2. Melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan 3. Melakukan monitoring atas tunggakan pemeriksaan rutin maupun khusus 4. Mengoptimalkan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Wajib Pajak 5. Melakukan penilaian asset wajib pajak	Q1 1. Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan 2. Kertas Kerja Pemeriksaan 3. Monitoring atas Tunggakan Pemeriksaan 4. Laporan Hasil Pemeriksaan 5. Laporan Penilaian	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	DIPA biaya perjalanan dinas Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan Rp. 197.429.000



				Q2: 1. Melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan 2. Melakukan monitoring atas tunggakan pemeriksaan rutin maupun khusus 3. Mengoptimalkan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Wajib Pajak 4. Melakukan penilaian asset wajib pajak Q3: 1. Melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan 2. Melakukan monitoring atas tunggakan pemeriksaan rutin maupun khusus 3. Mengoptimalkan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Wajib Pajak	Q2: 1. Kertas Kerja Pemeriksaan 2. Monitoring atas Tunggakan Pemeriksaan 3. Laporan Hasil Pemeriksaan 4. Laporan Penilaian Q3: 1. Kertas Kerja Pemeriksaan 2. Monitoring atas Tunggakan Pemeriksaan 3. Laporan Hasil Pemeriksaan 4. Laporan Penilaian Q4: 1. Kertas Kerja Pemeriksaan 2. Monitoring atas Tunggakan Pemeriksaan 3. Laporan Hasil Pemeriksaan 4. Laporan Penilaian			
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				4. Melakukan penilaian asset wajib pajak Q4: 1. Melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan 2. Melakukan monitoring atas tunggakan pemeriksaan rutin maupun khusus 3. Mengoptimalkan hasil pemeriksaan yang disetujui oleh Wajib Pajak 4. Melakukan penilaian asset wajib pajak				
3	Tingkat efektivitas penagihan	Melanjutkan kegiatan konseling dan visit ke Wajib Pajak; Mempercepat kegiatan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak;	<i>Output:</i> Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajak. <i>Outcome:</i> Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan penagihan aktif	Q1: 1. Menetapkan DSPC 2. Memberitahukan Surat Paksa 3. Melakukan asset tracing terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak 4. Melaksanakan gelar perkara	Q1: 1. Daftar Sasaran Prioritas Pencairan 2. Surat Paksa 3. Data Kekayaan Wajib Pajak 4. Utang Pajak tervalidasi	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	DIPA Biaya Perjalanan Dinas Dokumen Penagihan Aktif Rp. 50.000.000



		Memprioritaskan tindakan penagihan aktif kepada piutang Wajib Pajak yang akan daluwarsa penagihan		Q2: 1. Memberitahukan Surat Paksa 2. Melakukan asset tracing terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak 3. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Q3: 1. Memberitahukan Surat Paksa 2. Melakukan asset tracing terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak 3. Melakukan Blokir terhadap Rekening Penanggung Pajak Q4: 1. Memberitahukan Surat Paksa	Q2: 1. Surat Paksa 2. Data Kekayaan Wajib Pajak 3. Berita Acara Pelaksanaan Sita Q3: 1. Surat Paksa 2. Data Kekayaan Wajib Pajak 3. Rekening Penanggung Pajak Terblokir. Q4: 1. Surat Paksa 2. Data Kekayaan Wajib Pajak 3. Rekening Penanggung Pajak Terblokir.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



				2. Melakukan asset tracing terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak 3. Melakukan Blokir terhadap Rekening Penanggu Pajak				
4	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Melakukan Perencanaan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien	<i>Output:</i> Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan dan operasional kantor <i>Outcome:</i> tercapainya kualitas pelaksanaan anggaran yang tinggi	Q1: 1. Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait untuk membuat rencana kerja sesuai RAB dan KAK dan mengoptimalkan DIPA yang tersedia di masing-masing seksi. 2.Membuat usulan revisi POK dan halaman III DIPA untuk kegiatan yang belum memiliki anggaran. Q2 1. Melakukan monitoring IKPA dan evaluasi kegiatan terkait pemanfaatan	Q1: 1.Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing seksi 2.Tersedianya anggaran untuk merealisasikan kegiatan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK). Q2: 1.Rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan KI	-



				anggaran di masing-masing seksi 2. Melakukan usulan revisi DIPA untuk kekurangan anggaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Q3: 1. Melakukan monitoring IKPA dan evaluasi kegiatan terkait pemanfaatan anggaran di masing-masing seksi 2. Melakukan usulan revisi DIPA untuk kekurangan anggaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Q4: 1. Melakukan monitoring IKPA dan evaluasi kegiatan terkait pemanfaatan anggaran di masing-masing seksi 2. Melakukan usulan revisi DIPA untuk kekurangan anggaran	2.Tersedianya DIPA hasil usulan Revisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Q3: 1.Rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 2.Tersedianya DIPA hasil usulan Revisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Q4: 1.Rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 2.Tersedianya DIPA hasil usulan Revisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan			
--	--	--	--	---	---	--	--	--



				berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru,



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Winardi





SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Wahyu Winardi		NAMA	Ahmad Djamhari
NIP	197002091996031002		NIP	196907101995031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Winardi
197002091996031002



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Djamhari
196907101995031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	110 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	51%	51%	75%	75%	100%	100%
	2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	51%	51%	75%	75%	100%	100%
	4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	



	6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
	7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
	8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
	10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Winardi

197002091996031002

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ahmad Djamhari

196907101995031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
RIAU

NOMOR KEP-133/WPJ.02/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU,

- Menimbang : a. bahwa kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan terhadap Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat secara serentak dan merata sesuai Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu untuk mengadakan Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Riau secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemenang Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 239/KM.1/2021 Tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-560/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-2726/PJ.01/2024 Tentang Kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU TENTANG PENETAPAN PEMENANG KANTOR PELAYANAN TERBAIK TINGKAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru sebagai Pemenang Pertama Kegiatan Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan peringkat tiga besar Kantor Pelayanan Pajak hasil Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

KETIGA : Menetapkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru untuk mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dalam Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau;

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Oktober 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK RIAU,



Ditandatangani secara elektronik
ARDIYANTO BASUKI

PERINGKAT 3 (TIGA) BESAR HASIL PENILAIAN KANTOR PELAYANAN
TERBAIK TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP RIAU TAHUN 2024

No	Nama Kantor	Peringkat
1.	Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru	Pertama
2.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	Kedua
3.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	Ketiga

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik

ARDIYANTO BASUKI

